



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPRIATNA**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN GEOGRAFI**
3. NHK : **952608**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.205.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.800 m2/108 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , WARISAN Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 1.900 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 389.400.000**

1. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



4. MOTOR, YAMAHA YUPITER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
2.400.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
6. MOTOR, HONDA I IMPRESSA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	205.119.732
F. HARTA LAINNYA	Rp.	125.000.000
Sub Total	Rp.	4.964.519.732
III. HUTANG	Rp.	62.862.530
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.901.657.202

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.